

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakter kemandirian siswa tunanetra di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dibentuk melalui proses yang bersifat multidimensional dan berkesinambungan dalam lingkungan pendidikan inklusif. Kemandirian yang terbangun mencakup kemampuan dalam menyelesaikan tugas akademik secara mandiri, berinteraksi sosial, mengambil keputusan, dan mengakses pembelajaran menggunakan alat bantu atau teknologi sesuai kebutuhan individu masing-masing.

Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan inklusif yang efektif tidak hanya berfokus pada integrasi fisik siswa dengan disabilitas ke dalam kelas reguler, tetapi juga harus mampu membangun potensi mereka sebagai individu yang utuh dan merdeka. Dalam perspektif keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pendidikan inklusif merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Pendidikan inklusif juga sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang setara untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat. Dengan membangun karakter dan kemandirian siswa tunanetra, pendidikan inklusif turut mewujudkan semangat kewarganegaraan aktif (*active citizenship*), di mana setiap individu dihargai sebagai subjek yang mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan inklusif bukan sekadar proses integrasi peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum, melainkan suatu upaya membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, mandiri, dan sadar akan hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam kerangka keilmuan PPKn, pendidikan inklusif adalah bagian dari proses pembelajaran nilai-nilai kewarganegaraan yang menanamkan keadilan, persamaan hak, penghormatan terhadap keberagaman, dan kemanusiaan. Maka, membangun pendidikan inklusif yang efektif adalah bagian integral dari pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Dukungan dari berbagai pihak di lingkungan sekolah terbukti menjadi elemen penting dalam pembentukan kemandirian tersebut. Guru memainkan peran sentral sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam memberikan stimulus yang mendorong pembentukan perilaku mandiri. Strategi pembelajaran yang disesuaikan, penggunaan pendekatan verbal, serta pemberian reinforcement positif berupa pujian dan perhatian, menjadi bentuk konkret dari teori behaviorisme Skinner yang menekankan pentingnya penguatan dalam pembentukan perilaku. Melalui pendekatan ini, siswa tunanetra tidak hanya merasa diperhatikan, tetapi juga dimampukan untuk menyelesaikan tantangan pembelajaran secara mandiri.

Dukungan teman sebaya juga menjadi faktor penguat yang signifikan. Lingkungan sosial yang inklusif dan responsif menciptakan rasa aman bagi siswa tunanetra untuk berekspresi, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Teman sebaya yang tidak bersikap diskriminatif dan justru memberikan dukungan sesuai kebutuhan membantu membentuk perilaku mandiri secara alami dan tanpa

tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan seperti kesetaraan, saling menghargai, dan tanggung jawab sosial telah terinternalisasi dalam kehidupan sekolah.

Dari sisi kelembagaan, peran sekolah sebagai pengatur kebijakan dan penyedia sarana pendukung sangat penting dalam menjamin keberlangsungan pendidikan inklusif. Meskipun masih terdapat keterbatasan seperti belum tersedianya guru pendamping khusus dan fasilitas yang belum sepenuhnya ideal, SMA Negeri 2 Lubuk Pakam telah menunjukkan komitmen kuat melalui pelatihan guru, penyediaan sarana dasar ramah disabilitas, dan kemitraan dengan lembaga luar. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa kemandirian siswa tunanetra tidak hanya dibentuk oleh individu dan hubungan interpersonal, tetapi juga oleh sistem dan struktur yang mendukung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, penulis memberikan saran kepada para pihak:

1. SMA Negeri 2 Lubuk Pakam sebagai sekolah inklusif dapat memperkuat komitmennya dalam membina kemandirian siswa tunanetra melalui pengembangan program pembelajaran yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan khusus. Sekolah perlu merancang program pembinaan kemandirian yang tidak hanya bersifat informal, tetapi juga terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Fasilitas pendukung seperti jalur pemandu, alat bantu penglihatan, serta teknologi pembelajaran digital yang ramah

disabilitas perlu terus ditingkatkan, agar siswa tunanetra memiliki akses yang setara dan mampu belajar secara lebih mandiri.

2. Bagi jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), penelitian ini memperkuat pentingnya pendidikan inklusif sebagai wujud nyata nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Keilmuan PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk pendidikan yang humanis dan adil bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, disarankan agar program studi PPKn mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap isu inklusi serta melibatkan mahasiswa dalam praktik lapangan di sekolah inklusif melalui program MBKM. Penelitian lanjutan dapat mengkaji peran pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan toleransi dan empati, guna mencetak lulusan yang siap menjadi agen perubahan dalam pendidikan yang berkeadilan.
3. Guru sebagai aktor penting dalam proses pembelajaran inklusif, diharapkan terus mengembangkan strategi pembelajaran adaptif dan diferensiasi yang mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan setiap siswa. Pelatihan guru secara berkala mengenai teknik pembelajaran inklusif, penggunaan alat bantu teknologi, serta pendekatan komunikasi yang empatik sangat penting untuk mendukung kompetensi profesional guru dalam menghadapi tantangan pendidikan inklusif. Selain itu, guru perlu menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dengan memberikan penghargaan, dorongan, serta menciptakan suasana kelas yang aman dan menghargai perbedaan.

4. Teman sebaya juga memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk terus menumbuhkan kesadaran dan sikap empati siswa reguler melalui kegiatan penguatan karakter, pelatihan sebaya, dan kegiatan kolaboratif antar siswa. Lingkungan sosial yang inklusif dan suportif akan mendorong tumbuhnya interaksi yang positif, yang pada akhirnya memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian siswa tunanetra tanpa rasa diskriminasi atau ketergantungan yang berlebihan.
5. Dari sisi kebijakan dan dukungan eksternal, pemerintah melalui dinas pendidikan diharapkan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap implementasi pendidikan inklusif, baik dalam bentuk pengakuan administratif, penambahan sumber daya, maupun dukungan regulatif yang memadai. Penempatan guru pendamping khusus, alokasi anggaran untuk alat bantu belajar, dan monitoring pelaksanaan program inklusif menjadi langkah konkret yang dapat memperkuat efektivitas sistem pendidikan yang menjamin hak semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.